



Media: Merapi

Hari: Kamis

Tanggal: 23 Februari 2017

Halaman: 4

Bawaslu RI Pantau Rekapitulasi di Yogya

YOGYA (MERAPI)- Rekapitulasi suara Pilkada Yogyakarta di tingkat KPU setempat, Rabu (22/2) mendapatkan perhatian langsung Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Nasrullah. Dia mengakui selisih tipis perolehan suara pasangan calon (paslon) bisa menjadi dasar untuk mengajukan gugatan hukum. Namun hal itu tergantung dari kemauan pihak paslon yang merasa dirugikan.

"Dasar hukumnya selisih sedikit (suara), boleh mengajukan Perselisihan Hasil Pemilu. Tapi itu tergantung dari yang pihak yang merasa dirugikan akibat produk keputusan KPU," kata Nasrullah usai memantau rekapitulasi suara di KPU Yogyakarta, Rabu (22/2).

Dia menilai hasil Pilkada

Yogyakarta kemungkinan besar akan berpolemik secara hukum di kemudian hari. Hal itu berdasarkan fakta riil dari hasil *real count* C1 KPU RI, kedua paslon selisih tipis. Oleh sebab itu dia memantau langsung rekapitulasi. Dia menyebut banyak Pilkada daerah lain yang perolehan suaranya juga selisih tipis.

"Tapi itu (*real count* C1 KPU) bukan hasil final. Kita tunggu hasil akhir rekap manual KPU," ujarnya.

Terkait puas dan tidak puas hasil perhitungan suara, dia menyatakan tim paslon melalui saksi bisa menyampaikan aspirasi saat rekapitulasi. Semua pihak terkait Pilkada harus menyikapi aspirasi tim paslon yang merasa dirugikan dengan bijak dan arif. Apabila akan diproses hukum hasil Pilkada diharapkan jangan sampai mengganggu kondisi sosial masyarakat di Yogyakarta.

"Biarkan berproses secara hukum tapi jangan berdampak ke tataran sosial masyarakat. Semua harus menjaga

kondusivitas," ucap Nasrullah.

Imbauan juga berlaku kepada para paslon Pilkada. Dia mengingatkan untuk menjaga iklim Yogyakarta yang aman dan nyaman. Prinsip masyarakat Yogyakarta menang ora umuk kalah ora ngamuk diharapkan bisa menjadi teladan.

Untuk integritas penyelenggara Pilkada yang disoroti salah satu paslon, dia yakin prinsip itu dijaga. Penilaian itu berdasarkan pantauan pemilu di Yogyakarta selama ini jarang penyelenggara Pilkada divonis bersalah di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. (Tri)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 05 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005